

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Asimetri Informasi**

###### **2.1.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan (teori agensi) adalah konsep yang memaparkan interaksi diantara pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang ditunjuk oleh *principal* untuk mengelola perusahaan sebagai pihak professional sesuai dengan kontrak yang disepakati. Menurut Jensen dan Smith (1984) teori agensi adalah konsep mengenai hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* memberi wewenangnya kepada *agent* untuk melangsungkan aktivitas kegiatan operasional dan sebagai pengambil keputusan yang mewakili *principal*. Terdapat tiga masalah dalam hubungan antara *principal* dan *agent* :

1. Pemegang saham mengontrol manajer
2. Biaya yang tidak dapat dilepaskan dari koneksi agensi
3. Menghindari dan mengurangi biaya agensi

Dari teori tersebut dapat diasumsikan bahwa setiap individu terdapat motivasi untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dari segi ekonomi dan psikologis dengan cara-cara tertentu, dan kurangnya pengawasan menimbulkan kesempatan terjadinya asimetri tersebut. Berdasarkan hubungan tersebut, *agent* yang memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dengan informasi yang

dimiliki dengan sengaja atau tidak untuk mengelabui pemegang saham merupakan tindakan dari asimetri informasi. Maka dari itu pemegang saham perlu untuk melakukan pengawasan terhadap manajer yang dapat dilakukan oleh pihak independen yang memerlukan biaya dalam bentuk biaya audit, merupakan bagian dari *agency cost* menurut pendapat Jensen dan Meckling (1976).

Teori keagenan dapat mengakibatkan asimetri informasi diantara pemilik dan manajemen, agar terhindar timbulnya asimetri tersebut maka diperlukannya suatu konsep salah satunya implementasi *good corporate governance*, yang dimana *good corporate governance* mampu menciptakan kondisi perusahaan lebih sehat.

#### **2.1.1.2. Asimetri Informasi**

Asimetri informasi timbul ketika *agent* memegang informasi lebih banyak, relevan, update atas perusahaan dan prospek kedepannya, ketimbang dengan *principal* (Andika & Sukartha, 2015). Sebagai organisasi pencari laba yang dimana *principal* dan *agent* ingin memaksimalkan laba dengan informasi yang dimiliki. Namun karena kesenjangan informasi yang dimiliki antara *principal* dan *agent* mengakibatkan akan memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). *Agent* yang menguasai informasi lebih luas sementara disisi *principal* dengan limit informasi yang terbatas serta ketidaktahuan memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam melakukan manajemen laba. Dengan pengungkapan informasi yang berkualitas dengan audit terhadap laporan keuangan dan pengawasan internal oleh pihak independen dapat mengantisipasi asimetri informasi. Asimetri informasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni :

### 1. *Adverse Selection*

Suatu kondisi asimetri informasi yang dimana salah satu pihak atau lebih yang melaksanakan usaha mempunyai informasi lebih daripada pihak-pihak lain. Dapat dicontohkan semisal nya manajer perusahaan mengetahui informasi penting, berguna dalam pengambilan keputusan, sedangkan *principal* tidak mampu mengetahui hal tersebut dan keputusan yang ditarik oleh manajer. Keputusan yang diambil sudah tepat atau tidak, tidak dapat diketahui. Oleh karena itu terjadinya asimetri informasi yang dihadapi oleh *principal* (Astutik, Cahyono, & Afroh, 2019).

### 2. *Moral Hazard*

Jenis asimetri yang pengontrolan informasi pada satu pihak atau pihak lainnya yang melakukan bisnis atau usaha dapat mengawasi aksi-aksi dalam memecahkan masalah sedangkan pihak-pihak diluar tersebut tidak memiliki informasi. Kondisi ini terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian.

Tingkat ketidak seimbang nya informasi dapat dilihat melalui *spread*, dan upaya dalam meminimalisasikan risiko rugi tercermin dalam *bid ask spread*. Menurut Rahmawati et.al (2007) dalam (N. K. Sari, 2012) bahwa untuk mengukur asimetri informasi sebagai salah satu ukuran likuiditas pasar dapat dengan *bid-ask spread*. Pengukurannya dapat dihitung dengan *relative bid-ask spread* sebagai proksi dalam penelitian ini. Dimana asimetri informasi yang dihitung dengan *bid-ask spread* merupakan selisih harga saat *bid* (beli) dan harga saat *ask* (jual) saham selama periode tertentu (Wiryadi & Nurzi, 2013). Presensi dari asimetri informasi

dianggap sebagai salah satu faktor manajemen laba. Karena apabila semakin banyak informasi internal perusahaan dapat dimanipulasi oleh manajer dari pemegang saham.

## **2.1.2. Good Corporate Governance**

### **2.1.2.1. Definisi *Good Corporate Governance* (GCG)**

*Good corporate governance* penting untuk diterapkan dalam perusahaan, GCG dapat menjadi alat untuk memonitor kinerja perusahaan, dan memberikan *suggestion* bagi manajemen untuk kegiatan operasional perusahaan. Mekanisme *corporate governance* akan memberikan perlindungan yang efektif kepada pihak *external, stakeholder* untuk memperoleh perlindungan atas investasinya dan *return* yang diharapkan serta memastikan tindakan yang dilakukan manajerial sesuai dengan visi perusahaan (M. Sari, 2018). Terdapat beberapa definisi dipaparkan oleh para ahli.

1. Menurut *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) , *Corporate governance* adalah sekumpulan rangkaian atas struktur dan proses yang di implementasikan dalam melangsungkan perusahaan, dengan tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang, tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang lain (Angraini, 2016).
2. Menurut FCGI (2001) , GCG adalah sistem peraturan yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pemerintah, serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, dengan

kata lain secara sederhana ialah suatu sistem yang mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan perusahaan (Iwan, 2016).

3. Menurut Bank Dunia (*World Bank*) GCG adalah perpaduan dari hukum, peraturan dan praktik usaha. Diterapkan dalam dunia korporasi bertujuan untuk menarik pemodal, melaksanakan efisiensi, serta untuk eksistensi dari usaha yang dimaksud (Mizwar.W, 2011).

Berdasarkan penguraian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG adalah sistem yang dapat mengendalikan perusahaan dan menjadi suatu nilai tambah bagi *stakeholder* dan GCG dapat memproteksi *stakeholder* dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan manajerial dalam informasi laporan keuangan.

#### **2.1.2.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

*Good corporate governance* pada awalnya digagas oleh Arthur Anderson yang mendorong agar perusahaan terbuka, jujur, bertanggung jawab dan transparansi serta konsisten dalam menjalankan peraturan sesuai dengan hukum perundang undangan yang berlaku. Berdasarkan *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) merumuskan prinsip-prinsip GCG yaitu ;

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi artinya semua informasi yang diungkapkan harus tepat waktu, akurat, dan dapat diperbandingkan, karena itu transparansi berkaitan dengan kualitas informasi laporan yang disajikan perusahaan. Kualitas informasi laporan perusahaan baik bersifat material maupun non-material dapat

mempengaruhi kepercayaan investor. Prinsip transparansi dapat diwujudkan dengan melakukan :

- a. Mengembangkan sistem akuntansi berbasis pada standar akuntansi berterima umum, sehingga menjadi suatu jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan merupakan pengungkapan penuh dan berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja dan evaluasi keputusan yang efektif.
- c. Mengembangkan manajemen risiko korporasi (*enterprise risk management*) , manajemen risiko membantu dalam mengidentifikasi, menilai, dan upaya meminimalisir risiko.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban manajerial perusahaan terhadap perusahaan, *stakeholder* , pemegang saham dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan secara efektif . Agar penerapan akuntabilitas dilaksanakan oleh setiap perusahaan maka diadanya komisaris independen, dewan komisaris dan audit intern yang efektif untuk mengawasi terwujudnya prinsip ini.

## 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban merupakan kepatuhan serta tanggungjawab perusahaan untuk menaati prinsip akuntansi berlaku umum dan peraturan perundangan-

undangan. Peraturan lain yang wajib untuk ditaati sesuai peraturan perundangan-undangan meliputi peraturan mengenai lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan keselamatan, perpajakan, larangan monopoli dan persaingan yang tidak sehat.

#### 4. Independensi (*Independency*)

Independensi dapat diartikan dengan sikap bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan orang, dan kejujuran. Perusahaan harus bersikap profesional dalam mengelola perusahaan tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang merata dalam memenuhi hak semua pihak baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas mendapat perlakuan yang adil. *Fairness* dapat juga berfungsi dalam memonitor dan sebagai jaminan dalam mendapatkan perlakuan yang adil dalam kepentingan perusahaan.

### **2.1.2.3. Manfaat *Good Corporate Governance***

Konsep umum *good corporate governance* adalah merealisasikan kegiatan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab dalam lingkungan bisnis. Kewajiban untuk menerapkan praktek dan prinsip GCG untuk perusahaan BUMN sejak tahun 2002 dengan diterbitkan keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara No.Kep-117/M-MBU/2002. Dan juga kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik tercantum pada pasal 2 (1) mengenai kewajiban menerapkan prinsip *good corporate governance* pada seluruh jenjang organisasi. GCG selain dapat menjadi suatu pengendalian, dan nilai tambah bagi stakeholder, serta pengaturan hubungan antara manajemen dan *stakeholder* . Berdasarkan pada *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2001, pelaksanaan GCG bermanfaat dalam :

1. Kinerja perusahaan dan efisiensi operasional akan meningkat bersamaan dengan terwujudnya proses pengambilan keputusan yang efektif, dan peningkatan pelayanan kepada stakeholders.
2. Memungkinkan memperoleh dana pembiayaan lebih rendah, dengan hal tersebut dapat menaikkan nilai corporate.
3. Mengukuhkan nilai perusahaan dimata investor, sehingga menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Kinerja perusahaan yang baik dengan adanya pengimplementasian *corporate governance* , dapat membuat pemegang saham merasa puas terhadap kinerja perusahaan.

#### **2.1.2.4. Penerapan *Good Corporate Governance***

Krisis ekonomi yang menerpa Indonesia tahun 1998 terdapat beberapa faktor penyebab, salah satu faktornya adalah lemahnya *corporate governance* Indonesia, pengelolaan korporasi yang buruk. Beberapa faktor lain disebabkan karena sistem regulasi yang lemah, standar akuntansi dan audit yang inkosisten, dan

praktek perbankan yang buruk. Lemahnya penerapan GCG juga dipengaruhi oleh sistem hukum dan peradilan.

Untuk itu pemerintah Indonesia menekankan untuk menerapkan GCG yang didukung melalui pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) agar dapat memperbaiki kerangka hukum, institusional, dan peraturan pengelolaan korporasi, menyiapkan kerangka dasar pelaksanaan *good corporate governance*. Agar terwujudnya kelangsungan bisnis yang sehat, bersih dan bertanggung jawab di Indonesia. Selain itu, upaya yang dilakukan dengan memantau implementasi GCG dan memonitor implementasi prinsip-prinsip GCG, sekaligus dengan memberikan *reward* pada perusahaan yang menerapkannya dengan pemberian *Annual Report Award* (ARA), dengan *reward* tersebut dapat menjadi nilai tambah sendiri bagi perusahaan.

#### **2.1.2.5. Dewan Komisaris**

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2014 No: 33 /POJK.04/2014 Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang berperan menjalankan pengawasan secara konvensional dan partikular berdasarkan anggaran dasar dan memberi saran kepada direksi. Dewan komisaris sebagai organ perseroan dalam perusahaan berperan untuk menjalankan kepemimpinan manajemen suatu perusahaan dalam mengelola kegiatan yang dibawahinya. Namun, dewan komisaris tidak berhak untuk campur tangan atas pengambilan keputusan terhadap operasional perusahaan. Prinsip yang diperlukan agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berlangsung secara efektif, yaitu (KNKG, 2011) :

1. Struktur dari dewan komisaris wajib menjamin keberlangsungan sistem *check* dan *balance*, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pada kecermatan, ketepatan, keefektifan dan independen.
2. Sikap profesional dengan integritas dan kemahiran dalam menjalankan fungsi, dengan memperhatikan semua kepentingan pemangku.
3. Fungsi dewan komisaris selaku pemberi nasihat dan pengawasan, meliputi perbaikan, pencegahan, hingga pada pemberhentian sementara

Dewan komisaris independen terbentuk atas pengangkatan dari rapat umum pemegang saham yang dimana anggota komisaris independen ini dari pihak luar perusahaan. Ketentuan untuk menjadi komisaris independen adalah tidak memiliki koneksi atau afiliasi dengan pihak-pihak organ perusahaan, seperti pemegang saham, anggota direksi dan lainnya. Komisaris independen dikatakan independen karena keberadaan mereka menunjukkan ketidak terkaitan terhadap pemegang saham mayoritas, oleh karena itu dapat mewakili pemegang saham minoritas dan kepentingan investor dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Tahun 2000, dikeluarkannya peraturan oleh Bursa Efek Jakarta terkait keberadaan komisaris independen, bahwa perusahaan yang terdaftar diwajibkan untuk memiliki komisaris independen yang jumlahnya sepadan dengan pemegang saham minoritas atau 30% dari jumlah dewan komisaris (FCGI, 2010).

Berkaitan dengan pentingnya dewan komisaris independen, maka dibentuk dan pengaturan komisaris independen tercantum di Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Penjelasannya pada pasal 120 (2) UUPT yang

menyebutkan “komisaris independen termuat dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah komisaris dari pihak luar”.

Komisaris independen memiliki misi tertentu, yaitu :

1. Menciptakan suatu kondisi objektif dan keadilan sebagai prinsip yang memadai dalam pertimbangan manajerial.
2. Mendukung terjadinya prinsip, praktek *corporate governance* dan bertanggung jawab atas terdorongnya implementasi *corporate governance*.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk membantu pengembangan tugas serta fungsi dewan komisaris, selain daripada membantu pengawasan terhadap kinerja pengendalian internal, komite audit juga bertugas dalam meningkatkan efektivitas fungsi audit dan memastikan kualitas laporan keuangan (Asitalia & Trisnawati, 2017). Komite audit memiliki peran dan tanggung jawab diantaranya ;

1. Pengendalian terhadap proses implementasi *corporate governance*.
2. Memastikan adanya sosialisasi budaya *corporate governance* oleh manajer secara aktif.
3. Memahami seluruh hal terkait *issues* dan permasalahan yang dapat berimbas pada kinerja baik secara finansial maupun non-finansial.
4. Mengawasi agar perturan perundang-undangan ditaati oleh perusahaan.

5. Hasil audit atas evaluasi dari pengimplementasian *corporate governance* dan penemuan lainnya wajib dilaporkan oleh auditor internal secara tertulis.

Oleh karena itu, secara singkatnya maka dapat dikatakan fungsi pembentukan komite audit adalah untuk terciptanya suatu kepatuhan dan kontrol dalam mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan atau penyelewengan. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) menyarankan pada perusahaan serta didalam organisasi lainnya agar mempunyai komite audit yang ditetapkan sebagai komite tetap. Umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab terhadap :

1. Laporan keuangan (*financial report*)

Komite audit bertanggung jawab terhadap laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang disusun manajemen perusahaan dapat memberikan informasi gambaran kondisi terkait finansial, hasil kinerja, serta komitmen dan rencana jangka panjang dengan sebenarnya.

2. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*)

Pertanggung jawaban komite audit pada bidang tata kelola ialah memastikan entitas telah menaati peraturan undang-undang yang berlaku dan sikap etika bisnis yang baik, sekaligus pengawasan yang efektif.

3. Pengawasan perusahaan (*corporate control*)

Dalam hal pengawasan, tanggung jawab komite audit untuk menguasai pemahaman akan hal-hal yang berpotensi risiko dan sistem pengendalian internal, dan juga memantau pelaksanaan audit oleh auditor internal. Lingkup

audit internal meliputi penilaian dan pemeriksaan akan penerapan prosedur perusahaan, efektifitas pada pengawasan intern.

#### **2.1.2.6. Kepemilikan Institusional**

Sangat umum bagi perusahaan dengan struktur kepemilikan yang bervariasi, umumnya struktur kepemilikan tersebut meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan saham individual atau publik, dan kepemilikan institusional. Guna dari kepemilikan tersebut dapat mengontrol arah jalan perusahaan, tujuan perusahaan, hingga pada meningkatnya nilai perusahaan. Hal tersebut dapat terwujud disebabkan karena kontrol-kontrol dari berbagai unsur struktur kepemilikan modal perusahaan. Kepemilikan institusional secara singkat dan sederhana dapat diartikan sebagai kepemilikan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak investor institusi (Asitalia & Trisnawati, 2017). Pihak-pihak institusional dapat berupa institusi keuangan baik lembaga keuangan bank, sisi lain institusi non-bank seperti perusahaan dana pensiun, asuransi, investasi, perusahaan leasing serta reksadana. Dalam Agustia, 2013 dikatakan bahwa investor institusi dikelompokkan menjadi *transient investor* (pemilik sementara) dan *sophisticated investor*. Pendapat dari Jansen & Meckling (1976) bila kepemilikan institusional dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi tingkat *agency conflict*, dengan cara memonitoring pihak manajemen secara efektif. Dalam Struktur kepemilikan institusional memiliki manfaat yakni :

1. Keprofesionalan dalam menganalisis informasi.
2. Kontrol yang ketat dalam pelaksanaan menjalankan perusahaan.

Struktur kepemilikan baik kepemilikan manajerial, institusional, serta individual tau publik dinilai dapat menyelaraskan berbagai kepentingan dalam perusahaan dan mengurangi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti manajemen laba. Kepemilikan institusional tidak jarang memegang kendali atas saham mayoritas dengan sumber daya yang lebih besar, sehingga dinilai sanggup untuk melakukan pengawasan yang baik. Untuk menilai tingkat kepemilikan institusional dapat dicari dengan total dari saham yang kepemilikannya dikuasai oleh institusi dibagi dengan seluruh saham entitas yang beredar.

### **2.1.3. Manajemen Laba**

#### **2.1.3.1. Definisi Manajemen Laba**

Terdapat beberapa gagasan mengenai manajemen laba yang diungkapkan oleh para ahli. Dari segi para akademisi dan pelaku ekonomi juga memiliki argumen tersendiri mengenai manajemen laba. Apabila dilihat dari sudut pandang para akademisi, termasuk peneliti berpendapat bahwa manajemen laba merupakan suatu dampak dari kebebasan penggunaan metode akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Beberapa pengertian manajemen laba menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Davidson, Weil dan Stickney (1987), Manajemen laba merupakan langkah-langkah dalam pengambilan tindakan-tindakan tertentu yang terencana atau sengaja dalam batasan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum guna memperoleh tingkat yang diharapkan dari laba perusahaan yang dilaporkan.

2. Menurut Schipper, manajemen laba adalah suatu tindakan dimana manajemen perusahaan ikut terlibat dalam proses penyusunan pelaporan keuangan external, dengan maksud mendapatkan profit atau surplus bagi individu.
3. *National Association of Certified Fraud Examiners*, mengungkapkan bahwa manajemen laba sebagai keliruan, kelalaian, kelengahan yang sengaja dilakukan pada saat menyusun laporan berkaitan dengan bukti material atau data akuntansi, yang berakibat pada informasi tersebut dapat mengelirukan dalam pengambilan pertimbangan akhir, menyebabkan pembaca akan mengubah keputusan.
4. Healy dan Wahle, mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu tindakan yang muncul ketika manajer menggunakan kewenangannya mengambil keputusan tertentu dengan mengubah pencatatan transaksi dalam laporan keuangan. Berakibat pada informasi yang tidak sesuai pada fakta dan menyesatkan dengan menggunakan angka-angka akuntansi pada laporan keuangan.

Didasarkan pada definisi yang diungkapkan para ahli dapat dikatakan bahwa manajemen laba sebagai suatu tindakan campur tangan untuk mengatur dengan menaikkan atau menurunkan laba perusahaan dengan sengaja pada pelaporan laporan keuangan. Manajemen laba sendiri legal diperbolehkan dalam kondisi masih dalam prinsip akuntansi berterima umum. Menurut Stice (2007) dalam (Hery, 2013) terdapat beberapa faktor alasan untuk seorang manajer dalam melakukan

manajemen laba atau rekayasa laba yakni dalam memenuhi harapan external perusahaan, memenuhi target internal perusahaan, perataan laba, dan agar kinerja perusahaan serta laporan keuangan perusahaan tampak baik demi menarik investor, penawaran saham ke publik ataupun memperoleh dana pinjaman. Manajemen laba dapat dianggap sebagai suatu penipuan apabila sudah ada maksud sebelumnya untuk menipu pengguna laporan keuangan dengan cara yang material menurut Mulford dan Comiskey (Marai & Pavlovi, 2013).

#### **2.1.3.2. Pola dan Teknik Manajemen Laba**

Terdapat empat pola umum dalam praktik manajemen laba yang di paparkan oleh Scott 1997 yang meliputi (Sari & Ahmar, 2014) ;

##### *1. Taking a Bath*

Pola ini diatur dengan meningkatkan laba tahun berjalan dalam jumlah yang sangat ekstrem tinggi atau rendah pada laba tahun sebelumnya. Pola tersebut dilakukan oleh manajemen dengan cara menghilangkan beberapa aktiva dan membebaskan biaya pada periode mendatang di laporan saat ini, serta menyembunyikan bukti (*clear the desk*).

##### *2. Income Minimization*

Pola *Income Minimization* cukup sering dilakukan manajemen perusahaan untuk dapat menekankan pembayaran pajak, dengan cara menurunkan laba

tahun berjalan lebih rendah ketimbang kenyataannya. Manajer perusahaan menurunkan laba tahun berjalan, dapat dengan cara penghapusan aktiva tetap dan pengakuan biaya lebih awal.

### 3. *Income Maximization*

Pola ini bertolak belakang dari *income minimization* yaitu dengan memaksimalkan atau meningkatkan laba tahun berjalan lebih tinggi daripada laba sebenarnya. Tujuan utamanya adalah menjaga kinerja saham perusahaan dimata investor dan memperoleh kepercayaan dari kreditor.

### 4. *Income Smoothing*

Dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba, dengan meratakan laba yang dilaporkan sehingga lebih stabil. Karena pada umumnya investor cenderung lebih menyukai laba yang stabil yang tingkat risiko tidak terlalu tinggi.

Teknik-teknik dalam manajemen laba sangat beragam, baik yang diperbolehkan sesuai SAK dan prinsip akuntansi berterima umum. Manajemen laba dapat dikatakan ilegal, apabila bertentangan dengan SAK atau prinsip akuntansi berterima umum dan terbukti bersalah, maka dapat dikatakan sebagai skandal akuntansi. Terdapat beberapa pihak menyatakan suatu manajerial melakukan manajemen laba sebagai kecurangan apabila melakukan :

**Tabel 2.3** Tujuh permainan yang dilakukan oleh manjerial

Mencatatkan pendapatan terlalu awal atau lebih cepat
Mencatatkan pendapatan atau penjualan fiktif
Mengakui pendapatan lebih awal

Mengakui biaya periode berjalan menjadi biaya periode sebelum atau sesudahnya

Tidak mengungkapkan semua kewajiban

Mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode sebelumnya

Mengakui pendapatan akan datang sebagai pendapatan periode berjalan

Sumber : Davin,2005 dalam Sulistyanto, 2014

Praktik manajemen laba sering kali ditemui dan tidak dianggap sebagai suatu kecurangan dapat dilakukan dengan teknik :

#### 1. Mengubah Metode Akuntansi

Penggunaan metode akuntansi merupakan pilihan yang diberikan dalam standar penyusunan dan pelaporan laporan keuangan berdasarkan SAK. Metode – metode tersebut seperti metode FIFO (*first in first out*), LIFO (*last in first out*), rata-rata tertimbang dalam menilai persediaan, metode penyusutan aktiva tetap, metode harga pasar. Dalam pemilihan metode-metode tersebut dapat mempengaruhi tingkat laba naik maupun turun (Yando & Lubis, 2018).

#### 2. Membuat Estimasi Akuntansi

Tujuan utama daripada teknik ini adalah dapat mempengaruhi laba akuntansi melalui kebijakan meninjau kembali atau mengubah estimasi akuntansi. Contoh dengan merubah estimasi jumlah piutang tidak tertagih, estimasi umur ekonomis depresiasi dan amortiasi, tingkat bunga pasar dengan diskonto arus kas masa mendatang, dan lain-lain. Dikarenakan estimasi akuntansi diperbolehkan dan diakui selama tidak melanggar ketentuan prinsip akuntansi berterima umum, maka sering dijadikan objek manajemen laba. Oleh karena itu, semua yang terkait akan

perubahan akuntansi yang dilakukan oleh manajerial harus diungkapkan di catatan kaki laporan keuangan.

### 3. Menggeser periode biaya dan pendapatan

Periode biaya dan pendapatan dapat direkasaya dengan mempercepat atau menunda pengeluaran periode saat ini ke periode akuntansi bulan berikutnya. Contoh lainnya adalah mempercepat atau penundaan pengiriman produk kepada konsumen.

### 4. Mereklasifikasi Akun

Arti dari mereklasifikasi akun adalah memindahkan posisi akun dari satu tempat ketempat lain. Dengan penggunaan teknik tersebut akan berakibat pada salahnya interpretasi pengguna informasi. Sebagai contoh sebuah perusahaan menjual barang dagang dengan memberikan diskon sebesar 30% dari harga Rp 100.000 sebanyak 200 Unt. Diskon 30%/Unt seharusnya diakui sebagai diskon penjualan, namun manajemen perusahaan mencatat sebagai biaya pemasaran. Nilai tersebut tetap dicantumkan dan dilaporkan dalam laporan keuangan namun dalam akun yang berbeda. Sehingga akan meningkatkan atau menurunkan hasil akhir laba perusahaan, dengan tanpa merubah nilai akhir dalam laporan laba rugi.

#### **2.1.3.3. Metode Manajemen Laba**

Secara umum metode manajemen laba dapat melalui kebijakan akuntansi yaitu manajemen laba yang dilakukan dengan memperlakukan angka laba dengan tata cara dan kebijakan akuntansi, kedua manajemen laba melalui aktivitas rill dengan mengubah angka laba dari aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Semakin banyaknya upaya yang dilakukan manajerial untuk merekayasa laporan keuangan dengan tujuan tertentu. Tentunya diperlukan suatu

cara untuk dapat mengidentifikasi dan mendeteksi adanya praktik manajemen laba dapat perusahaan.

Atas dasar tersebut dikembangkanlah suatu pendekatan yang berbasis *specific accruals, distribution of earning* dan *after aggregate accruals* management untuk dapat mengidentifikasi dan mendeteksi manajemen laba (Sulistyanto, 2014). Metode akuntansi berbasis akrual lebih banyak diterapkan daripada akuntansi berbasis kas, dikarenakan metode akrual lebih mampu menunjukkan dan menggambarkan keadaan sesungguhnya keadaan perusahaan. Namun dibalik keunggulannya metode berbasis akrual memiliki kelemahan yaitu kelonggaran terhadap pemilihan metode akuntansi dalam penyusunan dan pencatatan laporan keuangan oleh manajerial dan komponen akrual tanpa membutuhkan bukti kas secara fisik. Karena hal tersebutlah sering dijadikan peluang bagi manajer untuk melakukan kecurangan dalam manajemen laba.

#### 1. Model Jones

Dikembangkan Jones tahun 1991, model ini tidak menggunakan asumsi *nondiscretionary accruals* adalah konstan. Dalam model tersebut ada dua asumsi dasar dalam pengembangan yaitu :

- a). *Current Accruals* (akrual periode berjalan) yakni perubahan pada akun modal kerja, berkaitan dengan perubahan lingkungan ekonomi perusahaan dan perubahan penjualan (Sulistyanto, 2014).

b). *Gross Property, plant, and equipment*, merupakan komponen dalam menghitung total akrual, terutama guna menghitung biaya depresiasi *nondiscretionary accruals*

$$NDA_t = \alpha_1 \frac{1}{A_{t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE_t}{TA_{t-1}}$$

**Rumus 2.1** *Non-discretionary Accruals Jones Model*

$\Delta REV_t$  = Pendapatan tahun  $t$  dikurangi pendapatan periode  $t-1$

$PPE_t$  = *Gross Property, plant, and equipment* periode  $t$

$TA_{t-1}$  = Total Aktiva periode  $t-1$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  = *Firm specific parammaters*

## 2. Model Jones Dimodifikasi (*Modified Jones Model*)

Model jones dikembangkan dan dimodifikasi sehingga terbentuk model Jones dimodifikasi, dirancang untuk mengeliminasi tendensi perkiraan yang salah, untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melampaui pendapatan. Untuk menghitung manajemen laba dengan model jones modefikasi dapat dilakukan dengan cara :

### 1. Total akrual

$$TA_{it} = \text{Net Income} - \text{Cash flow from operation}$$

**Rumus 2.2** Total Akrual

### 2. Menghitung *Expected current accruals*

$$\frac{TA_{i,t}}{A_{i,t-1}} = \alpha \frac{1}{A_{i,t-1}} + \alpha_1 \frac{\Delta REV_{i,t}}{A_{i,t-1}} + \alpha_2 \frac{PPE_{i,t}}{A_{i,t-1}} + \varepsilon$$

**Rumus 2.3** *Expected Current Accruals*

$\Delta REV_{it}$  = Perubahan pendapatan perusahaan  $i$  periode  $t-1$  ke periode  $t$

$\Delta REC_{it}$  = Perubahan piutang perusahaan  $i$  pada periode  $t-1$  ke periode  $t$

$PPE_{it}$  = *Property, plan and equipment* perusahaan i pada periode t.

$A_{i,t-1}$  = Total aset perusahaan i pada periode t-1

### 3. Menghitung *Non-discretionary accruals* (NDA)

$$NDA_{i,t} = \beta_1 \frac{1}{A_{i,t-1}} + \beta_2 \left( \frac{\Delta REV_{i,t}}{A_{i,t-1}} - \frac{\Delta REC_{i,t}}{A_{i,t-1}} \right) + \beta_3 \frac{PPE_{i,t}}{A_{i,t-1}}$$

**Rumus 2.4** *Non-discretionary Accruals*

$NDA_{i,t}$  = *Non-discretionary accruals* perusahaan pada periode t

$A_{i,t-1}$  = Total aset perusahaan i pada periode t-1

$\Delta REV_{it}$  = Perubahan pendapatan perusahaan i periode t

$\Delta REC_{it}$  = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t

$PPE_{it}$  = *Property, plan and equipment* perusahaan i pada periode t.

### 4. Menghitung *Discretionary accruals*

$$DA_{i,t} = \frac{TA_{i,t}}{A_{i,t-1}} - NDA_{i,t}$$

**Rumus 2.5** *Discretionary Accruals Modified Jones Model*

$DA_{i,t}$  = *Discretionary accruals* perusahaan I pada periode t

$A_{i,t-1}$  = Total aset perusahaan i pada periode t-1

$TA_{i,t}$  = Total akrual perusahaan i

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai salah satu referensi serta rujukan dalam melaksanakan penelitian dan bahan kajian dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian (Sutarmin, 2015) mengenai mekanisme GCG, dan manajemen laba

perusahaan disektor manufaktur Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015. Dinilai melalui dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial sebagai bagian dari mekanisme GCG. Hasil daripada penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil dengan hanya kepemilikan manajerial yang berpengaruh signifikan, sementara itu pengukuran melalui ukuran komite audit dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh, dan dewan komisaris berpengaruh namun pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Selanjutnya penelitian (Agustia, 2013) terkait akan faktor pengaruh *good corporate governance*, *leverage*, dan *free cash flow*. Ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian bahwa seluruh proksi daripada seluruh komponen mekanisme *corporate governance* berupa variabel komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris tidak terkait terhadap manajemen laba. Namun dua variabel lainnya yaitu *free cash flow* berpengaruh namun pengaruh negatif dikarenakan tingginya suatu arus kas perusahaan tidak memiliki kaitan dengan manajemen laba, dan *leverage* berpengaruh hal tersebut ditunjukkan dengan rasio yang tinggi berarti bahwa hutang lebih besar daripada aktiva dan kecenderungan melakukan manipulasi lebih tinggi.

Penelitian (Barus & Setiawati, 2015) yang bertujuan mengetahui dan mengkaji pengaruh asimetri informasi, mekanisme *corporate governance*, dan beban pajak tangguhan dengan objek penelitian perusahaan manufaktur BEI tahun 2010-2012 dengan manajemen laba sebagai variabel dependen. Ketimpangan informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan memungkinkan manajer

untuk melakukan manajemen laba. Namun hasil statistik pengelolaan data ditunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari asimetri informasi terhadap manajemen laba. Karena asimetri informasi dinilai bukan sebagai faktor dasar manajer melakukan manajemen laba.

Penelitian (Emy Puji, Nur, & M.Cholid, 2019) diperoleh hasil penelitian mengenai faktor *good corporate governance* dengan proksi seperti dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan institusional didapati hasil yang positif signifikan terhadap manajemen laba yang dalam artian berpengaruh signifikan, sementara itu kepemilikan oleh manajerial dinilai tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan variabel bebas lainnya *free cash flow* serta *leverage* mendapatkan hasil berupa pengaruh yang positif signifikan terhadap manajemen laba dengan sektor perusahaan tambang khususnya batu bara.

(Kusumawati, Sari, & Trisnawati, 2013) membuktikan dengan penelitiannya dengan judul pengaruh asimetri informasi dan mekanisme *corporate governance* pada praktik *earnings management* diperoleh hasil penelitian bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit, juga kepemilikan institusional tidak ditemukan adanya pengaruh, hanya ukuran dewan komisaris yang didapatkan berpengaruh secara nyata pada tindakan manajemen laba perusahaan terindeks konvensional. Semakin besar ukuran dari dewan komisaris dapat menekankan tingkat manajemen laba. Perbandingan dengan perusahaan indeks syariah menunjukkan kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh, yang berpengaruh pada praktik manajemen laba dengan proporsi *corporate governance* hanya ukuran dewan komisaris dan

kepemilikan institusional. Variabel independen ke-2 asimetri informasi pada perusahaan konvensional berpengaruh positif, namun perusahaan syariah tidak diperoleh hasil yang sama berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

(Mulyani, 2018) perolehan hasil penelitian didapatkan bahwa dari seluruh variabel adopsi IFRS, dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi, asimetri informasi serta ukuran perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel tetap. Hanya variabel dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan yang dinilai memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Dari penilaian akan penelitian tersebut, Mulyani menarik kesimpulan tidak berpengaruhnya asimetri informasi dapat dilakukan melalui *Tobin's Q* pada penelitian berikutnya untuk memperoleh asimetri yang lebih detail pada masing-masing entitas perusahaan.

Konsisten dengan riset oleh (Maiyusti, 2014) di tunjukkan dari hasil uji regresi tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari asimetri informasi. Tidak berpengaruhnya asimetri informasi dinilai dapat disebabkan kemungkinan kesalahan pada pelaporan keuangan sebelumnya yang tidak mengikuti kaidah kualitatif yang relevan dalam informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, netral dan lengkap dalam penyajian, serta memiliki daya banding dan daya uji.

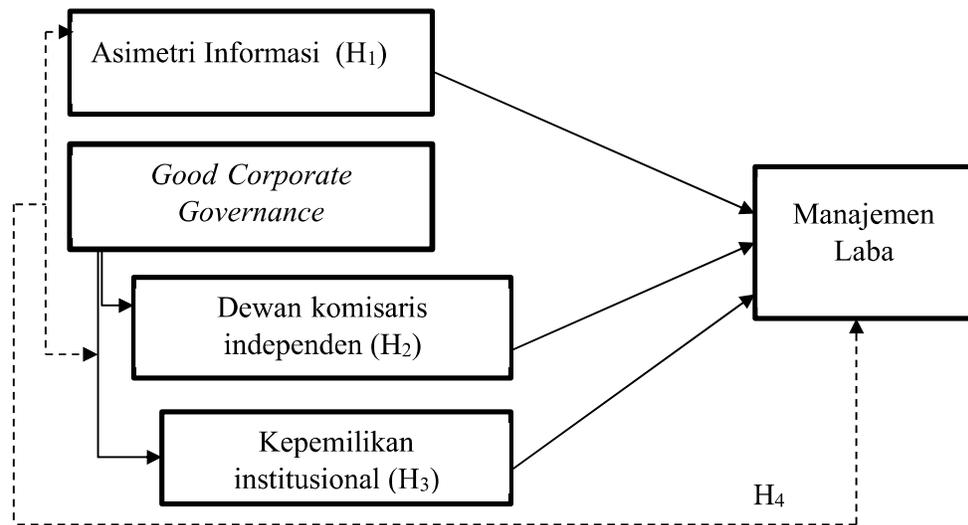
Menurut penelitian dari (Yando & Lubis, 2018) berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapatkan hasil berupa asimetri informasi berdampak pada manajemen laba. Terjadinya asimetri informasi berakibat pada ketidak

seimbangya informasi dimanfaatkan oleh manajer dalam melakukan praktik manajemen laba.

Berdasarkan studi (Mansor, Che-Ahmad, Ahmad-Zaluki, & Osman, 2013) dari seluruh sampel yang diteliti didapatkan bahwa mekanisme dari corporate governance dengan *board independence*, *Audit commite independence*, *audit commite size*, *non-multiple directorship*, intern audit, dan ukuran perusahaan di nilai berpengaruh dalam mengatasi manajemen laba dari perspektif perusahaan keluarga maupun non-keluarga. Terutama pada perusahaan non-keluarga penerapan GC lebih efektif. Untuk perusahaan keluarga didapatkan hasil bahwa hanya jumlah rapat dewan secara signifkkn memiliki hubungan yang negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan keluarga.

### **2.3. Kerangka Penelitian**

Kerangka penelitian berdasarkan penelitian sesuai dengan materi yang diambil “Pengaruh Asimetri Informasi dan *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan LQ45 Bursa Efek Indonesia”. Maka ilustrasi atas kerangka berpikir sebagai berikut :



**Gambar 2.1** Kerangka pemikiran penelitian

#### 2.4. Hipotesis

Didasarkan pada teori keagenan, ketimpangan informasi dan ketidaktahuan *principal* mendorong motivasi manajemen melakukan manajemen laba, semakin kurangnya informasi yang dipublikasikan berimbas pada tingginya tingkat manajemen laba. Pengungkapan informasi yang berkualitas dan penerapan *good corporate governace* dapat mengatasi tindakan yang bersifat kecurangan manajer yang didasari dari konflik kepentingan. GCG kini menjadi salah satu kunci utama dalam mengatasi praktik-praktik kecurangan yang dilakukan manajerial, sehingga dituntut penerapannya dapat mengontrol tindakan manajer.

Penelitian kuantitatif bersifat menguji hubungan antar variabel, hipotesis merupakan proposisi yang keberlakuannya masih perlu untuk dilakukan pengujian untuk mengetahui kebenarannya atau jawaban sementara atas pertanyaan-

pertanyaan terhadap penelitian (Martono, 2011). Hipotesis yang disimpulkan sementara oleh peneliti berupa :

H<sub>1</sub> : Asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

H<sub>2</sub> : *Good corporate governance* dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H<sub>3</sub> : *Good corporate governance* dengan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H<sub>4</sub> : Asimetri informasi dan *Good corporate governance* dengan proporsi dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.